REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

2. VISI : Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

3. MISI :
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	3.500.000,0
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	3.540.000,0
Total		7.040.000,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu		39.157.837,0
01.01	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu	78	
01.02	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	0	
01.03	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	0 (tidak dihitung)	
02	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif		3.500.000,0
02.01	Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif	70	
02.02	Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	70	
02.03	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	70	
03	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		2.430.276.632,0
03.01	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.02	Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5	
03.03	Indeks Sistem Merit;	265	
03.04	Indeks BerAKHLAK	78	
03.05	Indeks Reformasi Hukum	78	
03.06	Opini BPK	WTP	
03.07	Indeks Pengelolaan Aset	3,80	
03.08	Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	
03.09	Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	
03.10	Nilai SAKIP Bawaslu	70	
03.11	Nilai Capaian IKU	100	
03.12	Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100	
03.13	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	
03.14	Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,5	
03.15	Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	
03.16	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82	
03.17	Indeks SPBE *) Instrumen Evaluasi akan mengalami perubahan disesuaikan dengan kebijakan nasional, sehingga target nasional akan disesuaikan kemudian	3,5 (Sangat Baik)	
03.18	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	
03.19	Indeks Citra Positif Bawaslu	82	
Total			2.472.934.469,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	42.657.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.657.837,0	0,0	0,0	0,0
115.WA	Program Dukungan Manajemen	2.430.276.632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430.276.632,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.472.934.469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.472.934.469,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 16 September 2026